



Laporan Keanggotaan Sea Delight, LLC dalam Seafood Savers

Ringkasan perkembangan perbaikan perikanan
oleh Sea Delight periode Juli - Desember 2012

Muhammad Maskur Tamanyira – Seafood Savers
Officer

Informasi Umum

1. **Lokasi** : Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap, Sendangbiru, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Survey pertama : Oktober 2010
Jumlah petambak/nelayan : Total keseluruhan nelayan tuna di Sendangbiru
Ukuran Kapal : 1. Jenis Sekoci = 5 – 17 GT; 2. Jenis Jukung = 75 armada. Jumlah ini merupakan jumlah keseluruhan armada tangkap tuna di Sendangbiru
2. **Praktik Penangkapan**
 - Ukuran minimal panen/tangkap (nama komoditas) : Juvenil tuna, sekitar 10-15 Kg (berat tidak baku, karena tidak ditimbang satuan jika ukuran tuna tidak mencapai 20 Kg)
 - Metode penangkapan : Pancing Ulur, dengan armada tangkap 5-17 GT
 - Kisaran harga : Rp. 35.000 – 50.000/ Kg

Di Sendangbiru, perikanan yang menjadi komoditas adalah Tuna, salah satunya jenis Tuna Sirip Kuning (Thunnus albacares). Ditangkap dengan pancing ulung (Handline) jenis ikan ini menjadi target utama pengimpor, yang berdatangan dari wilayah sekitar. Proses transaksi ikan hasil tangkapan dilakukan dengan cara lelang, yang diselenggarakan oleh Kantor Unit Pengelola Pelabuhan setempat.

3. Kapasitas produksi

Secara umum, produksi tuna di Sendangbiru di tahun 2012 total produksi ikan yang didaratkan di PPP Pondokdadap mencapai 5.273,27 ton dengan nilai Rp 55.244.988.963. Produksi tuna, cakalang dan tongkol sebesar 3.378,55 ton atau mencapai 64,06% dari total produksi ikan yang didaratkan di PPP Pondokdadap. Adapun jenis tuna yang tertangkap antara lain madidihang (Thunnus albacares), tuna mata besar (Thunnus obesus) dan albakora (Thunnus alalunga) yang mencapai 1.012,10 ton (19,19%), sedangkan cakalang (Katsuwonus pelamis) sebesar 600,81 ton (11,39%) dan tongkol mencapai 1.765,64 ton (33,48%) (PPP Pondokdadap, 2012 dalam laporan Tahunan LOKA Tuna Bena 2013).

4. Keterangan tambahan

Pergantian rantai perdagangan dari CV. Giovanni Sukses Makmur di Sendangbiru mengakibatkan tidak adanya aktivitas perbaikan berarti di Sendangbiru

Rincian evaluasi keanggotaan (nama perusahaan) berdasarkan *Fisheries Improvement Program* (FIP) yang telah dilaksanakan:

AKTIVITAS / TUGAS	OUTPUT DAN INDIKATOR UNTUK AKTIVITAS/TUGAS	DETAIL AKTIVITAS (untuk anggota Seafood Savers)	PEMIMPIN AKTIVITAS & MITRA	Tahapan SEAFOOD SAVERS		HASIL EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT/ KENDALA
				INTERMEDIATE	ADVANCE		
1. TATA KELOLA DAN DEFINISI DARI OBJEKTIF PENGELOLAAN PERIKANAN NASIONAL							
1.1. Memperjelas objektif untuk memastikan bahwa prioritas diberikan pada perikanan berkelanjutan dan pengelolaan perikanan berbasis lestari pada	Mekanisme untuk memperluas hukum pada saat ini untuk memprioritaskan keberlanjutan dari perikanan, ketimbang objektif produksi dan perumbuhan, dan mengakomodasi prinsip PAFM dan EAFM	1.1.1 Memfasilitasi proses perkembangan dari EAFM dan/atau regulasi lain yang mendukung prinsip perikanan berkelanjutan	SDI, P4KSI			Belum dilaksanakan	EAFM untuk perikanan tuna belum dilakukan.

		1.1.2. Mengembangkan peraturan perusahaan untuk mendukung implementasi dari EAFM dan/atau regulasi lain yang mendukung prinsip perikanan berkelanjutan	Perusahaan			Belum dilaksanakan	EAFM untuk perikanan tuna belum dilakukan.
1.2. Perpanjangan dari system pengelolaan pada tingkat lokal	Seluruh prinsip pengelolaan perikanan, termasuk pendekatan pencegahan, harus diperluas ke tingkat kabupaten dan provinsi	1.2.1 Memfasilitasi regulasi provinsi/kabupaten sebagai intrepertasi dari peraturan kementerian terkait rencana pengelolaan yang mencakup Harvest Control Rule	SDI, P4KSI, DKP Provinsi & Kabupaten, PLN, PSDP			Bekerjasama dengan Subdirektorat evaluasi dan pengelolaan KKP. Untuk melalukan sosialisasi pencatatan tuna di Sendangbiru. Bersama dengan kampanye penggunaan circlehook pada tahun 2011.	Diharapkan upaya sosialisasi ini ditindaklanjuti dengan melaksanakan Permen 18/2010 tentang pencatatan logbook oleh unit pengelola pelabuhan perikanan pantai Pondokdadap, Sendangbiru

		<p>1.2.2. Perusahaan mengimplementasikan langkah langkah yang diatur pada rencana pengelolaan perikanan Provinsi/kabupaten sebagai patron dari perkembangan dan implementasi di area tersebut. Rencana tersebut harus memiliki harvest control rule yang mencakup prinsip perikanan berkelanjutan contoh: ukuran tangkap minimum, menyesuaikan jumlah usaha dengan kapasitas stok</p>	Perusahaan			Belum dilaksanakan	Peraturan logbook baru disosialisasikan belum sampai ke tahap penerapan
		<p>1.2.3. Memfasilitasi regulasi provinsi/kabupaten sebagai perpanjangan dari regulasi EAFM dan/atau regulasi nasional lainnya yang mendukung prinsip perikanan ikan karang yang berkelanjutan</p>	SDI, DKP Provinsi & Kabupaten			Belum dilaksanakan	EAFM untuk perikanan tuna belum dilakukan.

		1.2.4 Perusahaan mengimplementasikan langkah langkah yang diatur di guideline EAFM Indonesia dan/atau regulasi nasional lainnya yang mendukung prinsip perikanan ikan karang yang berkelanjutan sebagai patron dari pengembangan dan implementasi dari EAFM di tingkat Provinsi/Kabupaten	Perusahaan			Belum dilaksanakan	EAFM untuk perikanan tuna belum dilakukan.
1.3. Indonesia menjadi anggota penuh dari WCPFC dan bersifat instrumental dalam memformulasikan kebijakan pencegahan pada RFMOs dan implementasi keputusan	Untuk meneruskan proses untuk menjadi anggota penuh WCPFC	1.3.1. Perusahaan secara proaktif mendukung Indonesia untuk menjadi anggota WCPFC (e.g. mengirimkan surat kepada MMAF, menghadiri pertemuan WCPFC apabila diperlukan	Perusahaan			Belum dilaksanakan	Indonesia belum menjadi anggota penuh WCPFC

	1.3.2. Memonitor dan menyediakan dukungan untuk memastikan kelanjutan proses dari kenggotaan Indonesia dalam WCPFC	KKP (SDI, P4KSI, PUSKITA), KTI, KEMLU, SetKab			Belum dilaksanakan	Indonesia belum menjadi anggota penuh WCPFC
Secara aktif berpartisipasi dalam proses pengadopsian kebijakan pencegahan perikanan dalam RFMO	1.3.3. Memastikan prinsip pencegahan diadopsi dalam regulasi nasional (e.g. peraturan kementerian, rencana pengelolaan perikanan)	SDI, P4KSI			Belum dilaksanakan	Belum teridentifikasi adanya peraturan yang mendukung peraturan RFMO
	1.3.4. Mempromosikan pengadopsian prinsip pencegahan dalam RFMO mengikuti konvensi-konvensi internasional	SDI, P4KSI, PLN			Belum dilaksanakan	Belum teridentifikasi adanya peraturan yang mendukung peraturan RFMO
Secara teratur menghadiri pertemuan	1.3.5. Indonesia mempersiapkan laporan dan menghadiri pertemuan WCPFC and RFMOs lain yang relevan	SDI, P4KSI			Belum dilaksanakan	Belum ada dokumentasi kehadiran Indonesia di RFMO

1.4. Pengembangan rencana pengelolaan perikanan spesifik	Definisi dari target dan objektif, kepatuhan pada konvensi RFMO, implementasi alat nasional dan HCRs (lihat juga 3.4), implementasi langkah pengelolaan pencegahan, mengembangkan strategi mitigasi bycatch (3.5), mengaplikasikan MCS, dan meninjau ulang strategi	1.4.1 Pengembangan dokumen pengelolaan Tuna sesuai dengan rekomendasi FIP	SDI, P4KSI, PUP, PSDP, KTI dan stakeholder lainnya (ASTUIN, ATLI, DKP Provinsi dan Kabupaten, dll) dan WWF/SFP.			Belum dilaksanakan	WWF dan Poseidon sudah memiliki draf RPP Tuna dan rencana aksinya.
		1.4.2 Adopsi dari prinsip pengelolaan tuna ke dalam rencana pengelolaan perikanan berbasis area yang sudah ada	SDI, DKP Provinsi dan Kabupaten			Belum dilaksanakan	WWF dan Poseidon sudah memiliki draf RPP Tuna dan rencana aksinya.
		1.4.3 Perusahaan secara proaktif mendukung dan mengimplementasikan rencana pengelolaan perikanan (e.g. menyediakan surat mengenai rencana pengelolaan, secara proaktif menghadiri pertemuan apabila dibutuhkan)	Perusahaan			Belum dilaksanakan	WWF dan Poseidon sudah memiliki draf RPP Tuna dan rencana aksinya.

2. MEMPERKUAT KERANGKA INSTITUSIONAL						
2.1. Proses pengambilan keputusan dan konsultasi di konsolidasi melalui FKPPS dan Komite Pengelolaan Tuna, yang mengimplementasikan strategi pengelolaan pada perairan territorial, archipelagic dan EEZ	Melegalisasi FKPPS dan Komite Pengelolaan sebagai institusi apex formal untuk peran pengelolaan perikanan Indonesia sebagaimana didefinisikan	2.1.1 Memfasilitasi ketersediaan regulasi (e.g. peraturan kementerian) yang mendukung FKPPS dan otoritas pengelolaan nasional (e.g. KTI, satuan tugas) untuk bertanggung jawab atas pengelolaan perikanan	SDI, DKP Provinsi dan Kabupaten, stakeholder,		Belum dilaksanakan	FKPPS sudah ada namun masih bersifat ad-hoc (volunterary). Dan belum ada keputusan yang mengikat dari setiap hasil pertemuan FKPPS
		2.1.2 Memonitor dan mengevaluasi kinerja FKPPS dan/atau otoritas pengelolaan nasional (e.g. KTI, task force) yang dilaksanakan oleh instansi KKP baik internal maupun	SDI, DKP Provinsi dan Kabupaten, stakeholder,		Belum dilaksanakan	FKPPS sudah ada namun masih bersifat ad-hoc (volunterary). Dan belum ada keputusan yang mengikat dari setiap hasil pertemuan FKPPS

		eksternal untuk bertanggung jawab atas pengelolaan perikanan tuna				
Keputusan diimplementasikan secara sentral. Provinsi dan Kabupaten mengimplementasikan kebijakan, namun tidak bertanggung jawab atas memformulasikan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan syarat pengelolaan nasional	2.1.3 Memfasilitasi pembentukan otoritas untuk mengimplementasikan langkah-langkah pada rencana pengelolaan perikanan berbasis area (RPP WPP) di tingkat Provinsi/Kabupaten	SDI, DKP Provinsi dan Kabupaten, stakeholder,			Belum dilaksanakan	FKPPS sudah ada namun masih bersifat ad-hoc (volunterary). Dan belum ada keputusan yang mengikat dari setiap hasil pertemuan FKPPS
	2.1.4 Memonitor dan mengevaluasi kinerja FKPPS dan/atau otoritas pengelolaan nasional (e.g. KTI, task force) yang dilaksanakan oleh instansi KKP baik internal maupun eksternal untuk bertanggung jawab atas pengelolaan perikanan tuna	SDI, DKP Provinsi dan Kabupaten, stakeholder,			Belum dilaksanakan	FKPPS sudah ada namun masih bersifat ad-hoc (volunterary). Dan belum ada keputusan yang mengikat dari setiap hasil pertemuan FKPPS

		2.1.5 Secara aktif melibatkan industry, instansi penelitian, LSM dalam pertemuan terkait pengambilan keputusan perikanan	SDI, P4KSI, PUP, PSDP, KTI dan stakeholder lainnya (ASTUIN, ATLI, DKP Provinsi dan Kabupaten, dll)			Belum dilaksanakan	Perusahaan masih anggota baru, dan merupakan entitas non-Indonesia sehingga keterlubatan dalam asosiasi dan pertemuan nasional dan lokal terkait isu tuna masih terbatas
	Memungkinkan keterlibatan aktif dari stakeholders dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan	2.1.6 Perusahaan secara proaktif mendukung dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat provinsi/kabupaten dan nasional (e.g menghadiri pertemuan)	Perusahaan			Belum dilaksanakan	Perusahaan masih anggota baru, dan merupakan entitas non-Indonesia sehingga keterlubatan dalam asosiasi dan pertemuan nasional dan lokal terkait isu tuna masih terbatas
2.2. Identifikasi tanggung jawab dan peningkatan kapasitas pada badan-badan pelaksana	Allokasi tugas pada pemangku kepentingan spesifik, Satker Perikanan Tuna, KKP, DKP Provinsi dan Kabupaten serta kelompok komunitas	2.2.1 Memfasilitasi ketersediaan regulasi (peraturan kementerian, peraturan direktorat jenderal dll) mengenai alokasi tugas dengan deskripsi pekerjaan spesifik pada instansi	SDI, DKP Provinsi dan Kabupaten, stakeholder, sebagaimana dijelaskan di atas.			Bekerjasama dengan Subdirektorat evaluasi dan pengelolaan KKP. Untuk melakukan sosialisasi pencatatan tuna di Sendangbiru. Bersama dengan kampanye penggunaan circlehook pada tahun 2011.	Diharapkan upaya sosialisasi ini ditindaklanjuti dengan melaksanakan Permen 18/2010 tentang pencatatan logbook oleh unit pengelola pelabuhan perikanan pantai

		yang tebat dan relevan untuk mendukung pengelolaan perikanan				Pondokdadap, Sendangbiru
3. AKTIVITAS PENELITIAN						
3.1. Penguatan kapasitas National scientific stock assessment untuk mendukung pegelolaan yang memperhitungkan factor biologis	Peningkatan kapasitas SDN untuk stock assessment dan pembangunan unit penelitian spesifik untuk region di Benoa dan Bitung	3.1.1 Lokakarya 3.1.1 mengidentifikasi dan memastikan bahwa otoritas yang bertanggung jawab untuk melakukan analisis stock assessment teh diperkuat dan metodologi untuk assessment disetujui secara bersama (yang juga mencakup kebutuhan untuk MSC)	P4KSI, BPPL, KOMNAS KAJISKAN, BPSDM.			Belum dilaksanakan Belum disepakati kriteria menghitung stok, di kawasan perairan nasional
		3.1.2 Pelatihan mengenai stock assessment, biologis perikanan dan kapasitas penangkapan ikan	P4KSI, BPPL, KOMNAS KAJISKAN, BPSDM.			Belum dilaksanakan Belum disepakati kriteria menghitung stok, di kawasan perairan nasional

3.2. Indonesia memperkuat komitmennya terhadap pengumpulan dan kolasi data, terutama dalam bentuk struktur stok, kelimpahan stok, dan komposisi armada	Kelimpahan stok, komposisi armada, produktivitas stok dan struktur stok	3.2.1 Pengembangan modul metodologi sampling dan pelaksanaan pelatihan mengenai kelimpahan stok tuna, komposisi armada, produktivitas stok dan struktur stok	P4KSI, BPPL, SDI		Belum dilaksanakan	Belum disepakati kriteria menghitung stok, di kawasan perairan nasional
		3.2.2 Meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pengumpulan data tuna dengan memfasilitasi aktifitas penelitian dan menyediakan akses ke fasilitas produksi mereka	P4KSI, BPPL, SDI, industri (langsung dan via asosiasi industri)		Belum dilaksanakan	Belum disepakati kriteria menghitung stok, di kawasan perairan nasional
		3.2.3 Penelitian mengenai kelimpahan stok tuna, komposisi armada, produktivitas stok dan struktur stok menggunakan	P4KSI, BPPL, KOMNAS KAJISKAN		Belum dilaksanakan	

		metodologi yang disetujui				Belum disepakati kriteria menghitung stok, di kawasan perairan nasional
		3.2.4 Meningkatkan aktifitas penelitian dari institute penelitian tuna hindia di Benoa, dan mendorong pembangunan institute serupa di Bitung	P4KSI, BPPL, KOMNAS KAJISKAN		Belum dilaksanakan	Belum disepakati kriteria menghitung stok, di kawasan perairan nasional
3.3. Indonesia perlu mengadopsi LRP nya sendiri berdasarkan nasihat RFMO dan nasional agar stok yang dijaga di atas tingkat biomass menyediakan poin keuntungan berkelanjutan maksimal	Penguatan stock assessment (YFT, SKJ, BET dan lain-lain)	3.3.1 Melaksanakan stock assessment untuk tuna (YFT, SKJ, BET dll)	P4KSI, BPPL, KOMNAS KAJISKAN		Belum dilaksanakan	Belum disepakati kriteria menghitung stok, di kawasan perairan nasional
		3.3.2 Perusahaan berpartisipasi dalam pengumpulan data tuna dengan memfasilitasi aktifitas penelitian dan menyediakan akses ke	P4KSI, BPPL, SDI, industry (langsung dan via asosiasi industri)		Belum dilaksanakan	Belum disepakati kriteria menghitung stok, di kawasan perairan nasional

		fasilitas produksi mereka (e.g. Logbook, onboard observer, gonad sampling, data tangkapan tahunan, dll)				
Mengatur tingkat Level Reference Points nasional untuk masing-masing spesies	3.3.3 Mengembangkan draft level Reference Points nasional untuk masing-masing spesies tuna	P4KSI, BPPL, KOMNAS KAJISKAN, SDI			Belum dilaksanakan	RPP Tuna belum tersedia, dan kebutuhan mengenai Limit Reference belum dibahas secara nasional
	3.3.4 Membangun regulasi pada level Reference Points nasional untuk masing-masing spesies tuna	P4KSI, SDI			Belum dilaksanakan	RPP Tuna belum tersedia, dan kebutuhan mengenai Limit Reference belum dibahas secara nasional
Merekomendasikan ke WCPFC dan IOTC untuk memiliki LRP regional	3.3.5 Mengembangkan kebijakan mengenai regional LRP yang diatur berdasarkan kapasitas daya dukung biologis	SDI, WWF			Belum dilaksanakan	RPP Tuna belum tersedia, dan kebutuhan mengenai Limit Reference belum dibahas secara nasional

		3.3.6 Secara proaktif mengadvokasikan WCPFC dan IOTC untuk memiliki LRP regional	SDI, P4KSI, KTI, WWF			Belum dilaksanakan	RPP Tuna belum tersedia, dan kebutuhan mengenai Limit Reference belum dibahas secara nasional
3.4. Strategi panen formal diadopsi untuk tuna Samudera Hindia dan Pasifik Indonesia yang dihubungkan dengan (Nasional atau RFMO) Limit Reference Points, yang mencakup semua rentang perikanan (termasuk < 30 GT dan 5 GT). Objek haruslah konsisten dengan nasihat RFMO, untuk kasus Pasifik, adalah untuk membatasi usaha penangkapan pada level 2004, dan untuk mengurangi usaha	KKP mengembangkan Harvest Strategy yang dihubungkan dengan CMM 2008-01 untuk aktivitas EEZ/YFT dan BET dan membatasi usaha pada level 2001-2004, sebagai tambahan untuk langkah-langkah yang diambil (i.e kontrol usaha/ pengurangan kapasitas di perairan territorial/archipelagic apabila interaksi dengan juvenil YFT/BET bersifat signifikan	3.4.1 Mendukung P4KSI dalam pengembangan karya ilmiah yang memperhitungkan sumber daya tuna dan perikanan sebagai basis dalam mengembangkan dokumen kebijakan	SDI, FKPP, KTI			Belum dilaksanakan	RPP Tuna belum tersedia, dan kebutuhan mengenai data untuk kebutuhan pelaporan ilmiah belum digagas
		3.4.2 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP mengembangkan Harvest Strategy yang dihubungkan ke CMM 2008-01 untuk aktivitas EEZ/YFT dan BET dan pengetatan pada usaha yang	SDI, FKPP, KTI			Belum dilaksanakan	RPP Tuna belum tersedia, dan kebutuhan mengenai Limit Reference belum dibahas secara nasional

<p>pada YFT dan BET sebesar 30%</p>		<p>ditentukan sesuai dengan level 2001-2004, sebagai tambahan untuk langkah-langkah yang diambil (i.e kontrol usaha/ pengurangan kapasitas di perairan territorial/archipelagic apabila interaksi dengan juvenil YFT/BET bersifat signifikan</p>				
<p>3.5. Rencana pengelolaan perikanan spesifik ditetapkan mencakup peraturan kontrol yang didefinisikan secara baik dalam membatasi usaha (dengan perijinan entri yang ketat, terutama pada tingkat provinsi) dan efek dari BET juvenil (pengetatan pada penggunaan FADs (pada seluruh tingkatan pemerintahan), meningkatkan ukuran minimal jarring, area tertutup, dan lain-lain). Alat yang</p>	<p>Mengembangkan rencana pengelolaan perikanan spesifik (rencana pengelolaan perikanan nasional untuk Tuna)</p>	<p>3.5.1 Memfasilitasi proses pengembangan regulasi pengelolaan Tuna di Indonesia yang mengatur HCR, sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, pengetatan perijinan entri pada tingkat provinsi, mengurangi efek dari BET juvenil (melalui, contoh: pengetatan pada penggunaan FADs (pada seluruh tingkatan pemerintahan), meningkatkan ukuran minimal jarring, area tertutup, dan lain-lain). Alat yang</p>	<p>SDI, P4KSI, DKP Provinsi & Kabupaten, PLN, KKJI, PSDP</p>		<p>Belum dilaksanakan</p>	<p>RPP Tuna belum tersedia, dan kebutuhan mengenai Limit Reference belum dibahas secara nasional. Selain itu, peraturan rumpon telah tersedia, yaitu permen 30/ tahun 2004. Namun pelaksanaan di lapangannya belum diketahui secara jelas ketaatannya</p>

digunakan harus memprhitungkat ketidakpastian		digunakan harus memprhitungkat ketidakpastian					
		3.5.2 Partisipasi perusahaan untuk mendukung rencana pengelolaan tuna yang menyebutkan Harvest Control Rule e.g. batas ukuran minimal, menyesuaikan jumlah usaha dengan daya dukung dan regulasi, mengikuti semua perijinan perikanan, FADs; penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan; menangkap ikan di lokasi yang tepat, dll	Perusahaan		Belum dilaksanakan	Belum ada peraturan dari sea delight dan rantai perdagangannya untuk keterlibatannya dalam aktivitas perbaikan langkah ini di tingkat nasional dan lokal	
3.6. Pengumpulan data bycatch	Tinjauan ulang dari informasi yang tersedia mengenai status stok, termasuk perikanan umpan, hiu, marlin, dan species pelagis utama lainnya	3.6.1 Tinjauan ulang dari informasi yang tersedia mengenai status stok, termasuk perikanan umpan, hiu, marlin, dan species pelagis utama lainnya	P4KSI, KOMNAS KAJISKAN			Belum dilaksanakan	Pencatatan data bycatch di perikanan tuna handline skala kecil belum dilaksanakan

	3.6.2 Perusahaan menyediakan informasi mengenai status stok, termasuk perikanan umpan, hiu, marlin, dan species pelagis utama lainnya (cth: via log book dan/atau formulir penelitian)	Perusahaan			Belum dilaksanakan	Pencatatan data bycatch di perikanan tuna handline skala kecil belum dilaksanakan di tingkat nasional dan perusahaan
Pengembangan modul pelatihan observasi (dari contoh WWF/SPC) dan pelatihan observer	3.6.3 Memperbaiki modul pelatihan observer/enumerator yang sudah ada, terutama mengenai laporan data bycatch (Data yang sudah ada perlu lebih rinci)	P4KSI, BPPL, SDI, industri, WWF/NGO, Universitas, SPC			Belum dilaksanakan	Pencatatan data bycatch di perikanan tuna handline skala kecil belum dilaksanakan di tingkat nasional dan perusahaan
	3.6.4. Perusahaan mengimplementasikan program observer untuk armadanya	Perusahaan			Belum dilaksanakan	Pencatatan data bycatch di perikanan tuna handline skala kecil belum dilaksanakan di tingkat nasional dan perusahaan

	Mewajibkan monitoring kepadatan kumpulan ikan dan ukuran dari rumpon secara periodic untuk menentukan dampak pada spesies ikan lain yang tercakup dalam aktivitas.	3.6.5. Melakukan studi dan monitoring pada status dan dampak dari kepadatan kumpulan ikan, ukuran, dan spesies ikan lain yang tercakup dalam aktivitas pada rumpon	P4KSI, BPPL, SDI, industry, WWF/NGO, universities, SPC		Belum dilaksanakan	RPP Tuna belum tersedia, dan kebutuhan mengenai Limit Reference belum dibahas secara nasional. Selain itu, peraturan rumpon telah tersedia, yaitu permen 30/ tahun 2004. Namun pelaksanaan di lapangannya belum diketahui secara jelas ketaatannya
		3.6.6. Perusahaan menyediakan informasi dan melakukan monitoring pada dampak dari rumpon terhadap kepadatan kumpulan ikan, ukuran, dan spesies ikan lain yang tercakup dalam aktivitas.	Perusahaan		Belum dilaksanakan	RPP Tuna belum tersedia, dan kebutuhan mengenai Limit Reference belum dibahas secara nasional. Selain itu, peraturan rumpon telah tersedia, yaitu permen 30/ tahun 2004. Namun pelaksanaan di lapangannya belum diketahui secara jelas ketaatannya

	Modeling dari penghapusan perikanan untuk menilai dampak pada ekosistem menggunakan SPC tools – ECOPATH dll	3.6.7. Mendorong RFMO untuk melakukan modeling dari penghapusan perikanan untukto menilai dampak pada ekosistem menggunakan SPC tools – ECOPATH dll	P4KSI, SPC, CSIRO		Belum dilaksanakan	Belum ada model ecosystem yang dapat digunakan sebagai dasar

<p>3.7. Penyelesaian kerangka berbasis resiko untuk retained species dan bycatch (Cakalang, Tuna species kecil, mahimahi, kawakawa dan hiu) dan ikan umpan. Membutuhkan peneliti independen untuk mengumpulkan informasi kualitatif dan kuantitatif untuk melakukan pendekatan berbasis resiko yang mencakup SICA dan PSA</p>	<p>Pemangku kepentingan menerima pelatihan penilaian resiko dan berpartisipasi dalam workshop mengenai metode spesifik untuk menentukan resiko terhadap spesies non target</p>	<p>3.7.1 Melakukan pelatihan penilaian resiko dan berpartisipasi dalam workshop mengenai metode spesifik untuk menentukan resiko terhadap spesies non target pada pemangku kepentingan</p>	<p>P4KSI, BPPL, SDI, PSDP, industry, WWF/NGO, University, multi-stakeholder involvement, RFMOs, external research bodies</p>			<p>Belum dilaksanakan</p>	<p>MEtode RBF untuk lokasi ini dan di Indonesia belum dispeakati</p>
	<p>Diambil dari informasi 4.1 dan melakukan risk assessment/ penilaian resiko</p>	<p>3.7.2 Melakukan penilaian berbasis resiko untuk menentukan resiko terhadap spesies non target</p>	<p>P4KSI, BPPL</p>			<p>Belum dilaksanakan</p>	<p>MEtode RBF untuk lokasi ini dan di Indonesia belum dispeakati</p>
		<p>3.7.3 Perusahaan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk Risk Based Assessment untuk menentukan resiko terhadap spesies non target</p>	<p>Perusahaan</p>			<p>Belum dilaksanakan</p>	<p>MEtode RBF untuk lokasi ini dan di Indonesia belum dispeakati</p>
		<p>3.7.4 Mengembangkan strategi menggunakan</p>	<p>P4KSI, BPPL, WWF</p>			<p>Belum dilaksanakan</p>	<p>MEtode RBF untuk lokasi ini dan di Indonesia belum dispeakati</p>

		data dari RBA untuk evaluasi MSC				
3.8. Batas nasional untuk interaksi ETP ditentukan dan data independen dikumpulkan pada batas ETP untuk memastikan bahwa bycatch tercakup dalam persyaratan internasional dan nasional. Aktivitas mungkin butuh melibatkan observer untuk ditempatkan di seluruh rentang perikanan	NPOA difinalisasi untuk memperhitungkan WCPFC CMMs (hiu, penyu, setasea dan burung)	3.8.1 Mengembangkan NPOA dari spesies ETP di Indonesia (hiu, penyu, setasea dan burung)	SDI, FKPPS, KTI		Belum dilaksanakan	Beluma adanya aturan mengenai pemanfaatan bycatch di nasional (kecuali Penyu)

		3.8.2 Perusahaan menyediakan informasi dan mengimplementasikan NPOA dari spesies ETP di Indonesia (hiu, penyu, setasea dan burung)	Perusahaan			Belum dilaksanakan	Beluma adanya aturan mengenai pemanfaatan bycatch di nasional (kecuali Penyu)
3.9. Strategi pengelolaan dan mitigasi	Mengembangkan strategi penglolan untuk species bycatch dan baitfish untuk digabungkan ke dalam rencana pengelolaan (1.4)	3.9.1 P4KSI akan menyediakan karya ilmiah terkait sumberdaya tuna dan perikanan sebagai dasar dalam mengembangkan dokumen kebijakan	SDI, FKPPS, KTI, KAPI, P4KSI			Belum dilaksanakan	Beluma adanya aturan strategi dana atau mitigasi pemanfaatan bycatch di nasional

		<p>3.9.2 Perusahaan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan karya ilmiah mengenai strategi pengelolaan dan dokumen mitigasi untuk perikanan bycatch dan ikan umpan</p>	<p>Perusahaan</p>		<p>Belum dilaksanakan</p>	<p>Beluma adanya aturan strategi dana atau mitigasi pemanfaatan bycatch dan ikan umpan di nasional</p>
		<p>3.9.3 Direktorat pengelolaan sumber daya perikanan tangkap DG akan mengembangkan strategi pengelolaan dan dokumen mitigasi untuk perikanan bycatch dan ikan umpan</p>	<p>SDI, KAPI, P4KSI</p>		<p>Belum dilaksanakan</p>	<p>Beluma adanya aturan strategi dana atau mitigasi pemanfaatan bycatch dan ikan umpan di nasional</p>

		3.9.4 Perusahaan memiliki kebijakan untuk mendukung strategi pengelolaan dan dokumen mitigasi untuk perikanan bycatch dan ikan umpan	Perusahaan			Belum dilaksanakan	Belum adanya aturan strategi dana atau mitigasi pemanfaatan bycatch dan ikan umpan di nasional
3.10. Rencana Penelitian Indonesia dipersiapkan untuk memperhitungkan permintaan nasional dan internasional dan kewajiban dengan biaya yang semestinya dialokasikan dari industri, pemerintah dan donor	Mengumpulkan informasi untuk menentukan celah pada data, fokus taktis pada stok target yang kritis (dan tidak terbatas pada proses review FMA yang sedang berlangsung), Cost effective risk assessment ditanamkan kedalam analytical tools, aplikasi dari model ekosistem, pembangunan kapasitas untuk mendukung hal-hal di atas, peningkatan kesadaran dari aktivitas yang akan dilaksanakan dan	3.10.1 Workshop mengenai informasi untuk menentukan celah pada data, fokus taktis pada stok target yang kritis (dan tidak terbatas pada proses review FMA yang sedang berlangsung), Cost effective risk assessment ditanamkan kedalam analytical tools, aplikasi dari model ekosistem, pembangunan kapasitas untuk mendukung hal-hal di atas, peningkatan kesadaran dari aktivitas yang akan dilaksanakan dan	P4KSI, (BPPL.,BBRSE, KAPI)			Belum dilaksanakan	Pelaksanaan review perbaikan perikanan tuna belum dilaksanakan

	review periodik (termasuk sebagai bahan untuk dinilai oleh pihak external).	review periodik (termasuk sebagai bahan untuk dinilai oleh pihak external).					
		3.10.2 Perusahaan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk workshop tersebut	Perusahaan			Belum dilaksanakan	Pelaksanaan review perbaikan perikanan tuna belum dilaksanakan
	Mencari kerjasama dengan SPC/CSIRO terkait pengumpulan data ekosistem	3.10.3 P4KSI membentuk kerjasama dengan SPC/CSIRO terkait pengumpulan data ekosistem	P4KSI			Belum dilaksanakan	Dukungan data dan informasi kepada SPC dan tau CSIRO belum teridentifikasi
	Memasukan peningkatan kesadaran dari rencana penelitian untuk memperbaiki tingkat pemahaman dari pemangku	3.10.4 Melibatkan pemangku kepentingan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten pada sosialisasi dan implementasi	SDI, P4KSI, DKP Provinsi & Kabupaten, PLN, KKJI, PSDP			Belum dilaksanakan	Kegiatan terkait aktivitas ini belum dilaksanakan

kepentingan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten	3.10.5 Membagi hasil dari penelitian ke tingkat nasional dan kabupaten	SDI, P4KSI, DKP Provinsi & Kabupaten, PLN, KKJI, PSDP			Belum dilaksanakan	Kegiatan terkait aktivitas ini belum dilaksanakan
	3.10.6 Perusahaan terlibat dalam penelitian	Perusahaan			Belum dilaksanakan	Kegiatan terkait aktivitas ini belum dilaksanakan
Mengeksten proses tinjauan lang internal (cth: penelitian, pengelolaan) menggabungkan input dari tingkat provinsi dan kabupaten	3.10.7 Mengeksten proses tinjauan lang internal (cth: penelitian, pengelolaan) menggabungkan input dari tingkat provinsi dan kabupaten	SDI, P4KSI, DKP Provinsi & Kabupaten			Belum dilaksanakan	Kegiatan terkait aktivitas ini belum dilaksanakan
Untuk merencanakan proses tinjauan ulang eksternal, serta monitoring dan	3.10.8 Untuk merencanakan proses tinjauan ulang eksternal, serta monitoring dan	BPK, KTI			Belum dilaksanakan	Kegiatan terkait aktivitas ini belum dilaksanakan

	implementasi dari rencana tersebut	implementasi dari rencana tersebut				
4. PENGUATAN KEPATUHAN						
4.1. Implementasi aksi kepatuhan berdasarkan risk analysis dan menentukan bentuk penegakan prioritas pada seluruh rentang perikanan tuna	Rencana kepatuhan dikembangkan bersama dengan otoritas nasional, provinsi, dan kabupaten serta organisasi komunitas	4.1.1 Menginiasi pengembangan dari peraturan kepatuhan (termasuk aktivitas, mitra, dan biaya) mengikutsertakan otoritas nasional, provinsi, dan kabupaten serta organisasi komunitas	PSDP, DKP Provinsi & Kabupaten / POKMAS			Belum dilaksanakan Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS
		4.1.2 Disseminasi rencana kepatuhan untuk perikanan tuna	PSDP, DKP Provinsi & Kabupaten / POKMAS, associations			Belum dilaksanakan Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS
		4.1.3 Perusahaan mengembangkan kebijakan yang memastikan adopsi dan implementasi dari rencana tersebut	Perusahaan			Belum dilaksanakan Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS

4.2. Memperkuat legislasi pada sanksi	pelanggaran yang sudah ada untuk diperhitungkan dalam proses langkah pengelolaan pada perikanan (EEZ, archipelagic dan coastal)	4.2.1 Memfasilitasi pemerintah dalam memperbaiki sanksi dari peraturan, memperbaiki mekanisme pengawasan, dan penegakan pelanggaran hukum	PSDP/MMAF Legal Department		Belum dilaksanakan	Peraturan terbaru terkait pelaksanaan pengawasan dan hukuman yang akan diberikan belum tersedia
		4.2.2 Sosialisasi dari legislasi mengenai sanksi untuk pemangku kepentingan dari perikanan ikan karang	PSDP/MMAF Legal Department, associations		Belum dilaksanakan	Peraturan terbaru terkait pelaksanaan pengawasan dan hukuman yang akan diberikan belum tersedia
		4.2.3 Perusahaan mengembangkan kebijakan mengenai implementasi dari legislasi	Perusahaan		Belum dilaksanakan	Peraturan terbaru terkait pelaksanaan pengawasan dan hukuman yang akan diberikan belum tersedia

4.3. Proses edukasi bagi nelayan untuk langkah pengelolaan untuk spesies target, reduksi bycatch, dan konsekuensi dari interaksi ekosistem	Diperluas ke jaringan POKMASWAS. Membutuhkan pembelian yang cukup dari pengepul dan pengolah.	4.3.1 Pelatihan mengenai langkah-langkah pengelolaan (cth: spesies target, reduksi bycatch, dan konsekuensi dari interaksi ekosistem) untuk nelayan: - menggunakan BMP untuk praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan - menggunakan BMP untuk meningkatkan kualitas ikan agar mengurangi <i>overfishing</i> - menggunakan BMP untuk mitigasi bycatch - Catatan keterlaksanaan	PSDP, BPSDM KP, SDI, P4KSI, KAPI, DKP Provinsi & Kabupaten, Prosesor, pengepul dan WWF.		Identifikasi kelompok yang ada dan potensi untuk melaksanakan pelatihan BMP Tuna Handling	Melaksanakan pelatihan BMP pada semester selanjutnya
		4.3.2 Memastikan nelayan melaksanakan aktivitas penangkapan ikan yang berkelanjutan, sesuai dengan materi pelatihan 4.3.1	Perusahaan		Identifikasi kelompok yang ada dan potensi untuk melaksanakan pelatihan BMP Tuna Handling	Melaksanakan pelatihan BMP pada semester selanjutnya

4.4. Memperkuat system pengelolaan berbasis komunitas untuk perikanan hand-line dan perikanan pesisir lainnya.	Sistem dapat dikatakan telah ada, tetapi membutuhkan penguatan dari fungsi-fungsi dan dukungan PokMasWas.	4.4.1 Memfasilitasi pembentukan PokMasWas, yang dipersiapkan dengan pengawasan dan rencana monitoring untuk praktik penangkapan ikan (termasuk peningkatan kapasitas dan penguatan institusional)	PSDP, DKP Provinsi & Kabupaten, stakeholder			Belum dilaksanakan	Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS
		4.4.2 Memonitor kinerja PokMasWas sebagai bagian dari system pengelolaan	PSDP, DKP Provinsi & Kabupaten, stakeholder			Belum dilaksanakan	Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS
		4.4.3 Perusahaan mengembangkan kebijakan untuk mendukung pembentukan dan operasional dari PokMasWas	Perusahaan			Belum dilaksanakan	Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS

4.5. Laporan identifikasi pelanggaran yang terdeteksi dipersiapkan dan tersedia bagi public.	Mempersiapkan laporan identifikasi hasil inspeksi aktivitas, terutama aktivitas terkait penangkapan ikan	4.5.1 Memfasilitasi pengumpulan laporan kepatuhan regulasi	PSDP, DKP Provinsi & Kabupaten			Belum dilaksanakan	Peraturan terbaru terkait pelaksanaan pengawasan dan hukuman yang akan diberikan belum tersedia
		4.5.2 Memfasilitasi pengungkahan laporan ke situs KKP	PSDP, DKP Provinsi & Kabupaten			Belum dilaksanakan	Peraturan terbaru terkait pelaksanaan pengawasan dan hukuman yang akan diberikan belum tersedia
		4.5.3 Perusahaan mengembangkan kebijakan mengenai pengumpulan data pendukung dan persiapan laporan pelanggaran regulasi	Perusahaan			Belum dilaksanakan	Peraturan terbaru terkait pelaksanaan pengawasan dan hukuman yang akan diberikan belum tersedia
4.6. Melatih dan memperbaiki efektifitas dari petugas penegakan peraturan dan	Memperbaiki program pelatihan PSDP yang sudah ada, namun diperluas ke	4.6.1 Pelatihan pengawasan ke PokMasWas dan PSDP di Provinsi dan Kabupaten	PSDP, DKP Provinsi & Kabupaten			Belum dilaksanakan	Peraturan terbaru terkait pelaksanaan pengawasan dan hukuman yang akan diberikan belum tersedia

menambahkan perangkat keras pendukung	partisipasi Provinsi dan kabupaten						
		4.6.2 Memfasilitasi sinkronisasi workplan dengan stakeholder pengawasan lain untuk memperbaiki aktivitas pengawasan dan penegakan	PSDP, DKP Provinsi & Kabupaten, stakeholder			Belum dilaksanakan	Peraturan terbaru terkait pelaksanaan pengawasan dan hukuman yang akan diberikan belum tersedia
		4.6.3 Perusahaan mengembangkan kebijakan mengenai petugas penegakan pendukung di lapangan	Perusahaan				Peraturan terbaru terkait pelaksanaan pengawasan dan hukuman yang akan diberikan belum tersedia
5. ISU LAIN							
5.1. Tinjauan dampak dari subsidi bahan bakar pada keberlanjutan kapal 5-30GT; dan < 5 GT.	Melaksanakan tinjauan mengenai dampak dari subsidi dari sumberdaya perikanan pada seluruh perikanan (ramah lingkungan dan non-ramah	Telah terlibat di dalam studi mengenai kesempatan dan tantangan dari subsidi perikanan di Indonesia untuk mendukung perikanan berkelanjutan	PDN, PLN, BBRSE			Belum dilaksanakan	Penyusunan guideline fisheries subsidies sedang dbangun oleh internal WWF-ID

	lingkungan) dan variasi GT yang berbeda	Terlibat dalam studi subsidi perikanan	Perusahaan			Belum dilaksanakan	Penyusunan guideline fisheries subsidies sedang dbangun oleh internal WWF-ID
5.2. Menelusuri prospek perubahan penekanan dari subsidi bensin ke subsidi positif seperti insentif penangkapan ikan yang berkelanjutan.	Menelusuri subsidi positif yang dapat menguntungkan praktik-praktik perikanan berkelanjutan	5.2.1 Terlibat dalam pengembangan subsidi praktik terbaik perikanan yang tidak mengakibatkan overfising di Indonesia melalui serangkaian diskusi kelompok ahli	PDN, PLN, BBRSE			Belum dilaksanakan	Penyusunan guideline fisheries subsidies sedang dbangun oleh internal WWF-ID
		5.2.2 Mengembangkan kebijakan untuk mengembangkan dan mendukung subsidi positif	Perusahaan			Belum dilaksanakan	Penyusunan guideline fisheries subsidies sedang dbangun oleh internal WWF-ID